

## DAMPAK HUKUM KENAIKAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR KELAPA SAWIT TERHADAP HILIRISASI INDUSTRI DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI EKSPORTIR

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta

[losojudijantobumn@gmail.com](mailto:losojudijantobumn@gmail.com)

### **Abstract**

*This study examines the legal implications of the increase in palm oil export levies on industrial downstreaming and legal certainty for exporters. The policy of increasing export levies is viewed as a state instrument to encourage the domestic processing of palm oil products in order to create greater added value, strengthen downstream industries, and support the national downstreaming agenda. However, dynamic changes to the tariff also give rise to legal consequences in the form of potential legal uncertainty for exporters, particularly in contract planning, cost calculations, and adjustments to trade strategies. This study employs a normative approach using a literature review method that examines legislation, academic literature, and official sources relating to palm oil export levy policy. The findings indicate that an increase in export levy rates has the potential to positively drive the downstream processing of the palm oil industry; however, its effectiveness is highly dependent on regulatory consistency, technical clarity in implementation, and the assurance of legal certainty for business operators. Therefore, export levy policies must be designed proportionately to ensure that industrialisation objectives and legal protection are balanced.*

**Keywords:** *export levy, palm oil, industrial downstreaming, legal certainty, exporters.*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas dampak hukum kenaikan tarif pungutan ekspor kelapa sawit terhadap hilirisasi industri dan kepastian hukum bagi eksportir. Kebijakan kenaikan tarif pungutan ekspor dipandang sebagai instrumen negara untuk mendorong pengolahan produk sawit di dalam negeri agar tercipta nilai tambah yang lebih besar, memperkuat industri turunan, serta mendukung agenda hilirisasi nasional. Namun demikian, perubahan tarif yang dilakukan secara dinamis juga menimbulkan konsekuensi yuridis berupa potensi ketidakpastian hukum bagi eksportir, terutama dalam perencanaan kontrak, perhitungan biaya, dan penyesuaian strategi perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kajian pustaka yang menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta sumber resmi terkait kebijakan pungutan ekspor sawit. Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan tarif pungutan ekspor memiliki potensi positif dalam mendorong hilirisasi industri kelapa sawit, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi regulasi, kejelasan teknis pelaksanaan, dan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, kebijakan pungutan ekspor perlu dirancang secara proporsional agar tujuan industrialisasi dan perlindungan hukum dapat berjalan seimbang.

**Kata kunci:** pungutan ekspor, kelapa sawit, hilirisasi industri, kepastian hukum, eksportir.

### **Pendahuluan**

Kenaikan tarif pungutan ekspor kelapa sawit merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan struktur industri agar bergerak ke arah hilirisasi. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga dengan upaya mendorong pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri, sehingga industri sawit tidak terus bergantung pada ekspor bahan baku mentah semata (Kementerian Keuangan, 2022). Dalam konteks ekonomi nasional, kelapa sawit memegang